



BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan daerah dapat diuraikan berdasarkan rekomendasi kajian sinergitas dan keterkaitan unsur perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini menjelaskan tentang beberapa isu strategis terkait dengan justifikasi rencana RPJMD Tahun 2016-2021.

Permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1. PERMASALAHAN DIBIDANG PENDIDIKAN

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat 1) kebijakan pemerataan dan perluasan kesempatan dalam pendidikan menekankan bahwa setiap orang tampak memandang asal usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada sesama jenis, jenjang maupun jalur pendidikan, sehingga diharapkan keadilan dalam pelayanan pendidikan akan meningkat. Pemerataan akses dalam memperoleh pendidikan yang bermutu memberi arti bahwa di perlukan adanya upaya yang sistematis, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang adil, bermutu dan memiliki relevansi dengan kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi dan cepat dalam masyarakat. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan bertujuan mendorong terciptanya pengembangan kemampuan, kompetensi, kreatifitas, inovasi, kemandirian, daya saing peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi seni dan budaya. Di kabupaten Minahasa Selatan terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan bermutu :



1. Rata-rata lama sekolah belum semuanya memenuhi wajib belajar 9 tahun
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP/SMA/SMK masih relatif rendah,
3. Belum memadainya kompetensi tenaga kependidikan yang ditunjukkan oleh masih rendahnya nilai KKG tenaga kependidikan.
4. Sistem jaminan kesejahteraan guru masih lemah
5. Penempatan tenaga pendidikan belum merata
6. Kualitas tata kelola pendidikan belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam rangka peningkatan daya saing.
7. Infrastruktur pendidikan belum memadai

4.1.2 Permasalahan di bidang Kesehatan

Pembangunan kesehatan yang berkualitas merupakan prasyarat untuk mendukung pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan di bidang kesehatan dapat di wujudkan dengan mendorong pengembangan sumberdaya kesehatan yang meliputi sarana dan prasarana, dokter dan tenaga kesehatan serta pengembangan perilaku hidup sehat sebagai basis budaya masyarakat di masa depan.

Pembangunan kesehatan mensyaratkan adanya peran serta aktif masyarakat sehingga di perlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat.

Permasalahan mendasar yang berhubungan dengan kesehatan, antara lain:

1. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, dan jaminan pembiayaan kesehatan.
2. Kualitas pelayanan kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di wilayah-wilayah tertentu.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan.



4. Belum memadainya kondisi sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman.
5. Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat.
6. Terbatasnya jumlah, kualitas dan keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan.
7. Terbatasnya kualitas dan jumlah tenaga ahli kesehatan dan distribusi yang tidak merata.
8. Pelayanan kesehatan pada kelompok masyarakat miskin dan terpencil masih rendah.
9. Masih adanya kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita yang ditimbang.
10. Adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti Malaria, TBC, Kusta, AIDS, dan HIV positif.

4.1.3 Permasalahan di bidang Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum seperti prasarana jalan, jembatan, sumberdaya air perumahan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan serta fasilitas-fasilitas penunjang lain disuatu wilayah menjadi syarat utama untuk memacu pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum di arahkan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan pembangunan program-program unggulan daerah agar mampu bersaing di pasar global serta memacu pengembangan sektor riil. Dukungan infrastruktur yang memadai akan menjadi daya tarik bagi investor masuk ke daerah melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan bisnis

Permasalahan di bidang pekerjaan umum terutama sebagai berikut.

1. Belum memadainya pembangunan prasarana jalan karena keterbatasan pembiayaan termasuk untuk pemeliharaan.
2. Terbatasnya tingkat pelayanan irigasi akibat kekurangan air dan kerusakan-kerusakan jaringan irigasi
3. Makin meluasnya abrasi pantai



4. Terbatasnya kemampuan penyediaan sarana dan prasarana perumahan untuk rumah sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah
5. Rendahnya kualitas pelayanan dan pengelolaan air bersih
6. Belum memadainya pembangunan drainase termasuk pemeliharaan
7. Belum berfungsinya TPA Mobongo karena belum adanya alat-alat penunjang
8. Belum tersedianya sarana dan prasarana air limbah.

4.1.4 Permasalahan di bidang Perhubungan

Permasalahan di bidang perhubungan adalah sebagai berikut.

1. Kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung.
2. Penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi, dan jumlah pergerakan yang terjadi belum terakomodasikan dengan optimal.
3. Belum tersedianya rambu-rambu lalu lintas secara memadai.
4. Kurangnya perhatian masyarakat tentang uji kiir angkutan umum.

4.1.5 Permasalahan yang berkaitan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

Permasalahan yang berhubungan dengan penataan ruang antara lain :

1. Masih kurang tersedianya ruang terbuka hijau
2. Terjadinya alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman.
3. Rendahnya ketaatan dalam pemanfaatan ruang terhadap RTRW.

4.1.6 Permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pencemaran mutu air sungai di DAS Ranoyapo.



2. Pengawasan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) masih pada tataran administratif belum menyentuh pada substansi AMDAL itu sendiri.
3. Sarana dan prasarana persampahan belum memadai.
4. Rendahnya cakupan pelayanan air minum bagi penduduk.
5. Masih kurangnya penghijauan wilayah rawan longsor.
6. Penegakan hukum lingkungan belum maksimal.
7. Menurunnya daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sampah

4.1.7 Permasalahan yang berkaitan Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang tenaga kerja sebagai berikut:

1. Masih relative tinggi angka pengangguran dan rendahnya kompetensi tenaga kerja.
2. Kualitas tenaga kerja yang tersedia yang mencakup pengetahuan, ketrampilan, disiplin, dan etos kerja kebanyakan belum memenuhi kebutuhan pasar serta kepentingan pembangunan daerah.
3. Masih kurang jiwa dan semangat kewirausahaan.

4.1.8 Permasalahan yang berkaitan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan Pemuda dan olahraga saat ini adalah :

1. Pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga prestasi untuk kelompok elit.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasana untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
3. Organisasi yang membawahi cabang-cabang olahraga belum terkelola secara maksimal.

4.1.9 Permasalahan yang Berkaitan dengan Kebudayaan

Permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan adalah sebagai berikut.



1. Kawasan cagar budaya, benda dan situs belum secara maksimal dilestarikan.
2. Minimnya penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya.
3. Potensi budaya dan keindahan alam belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata.
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana gedung kesenian.
5. Semakin terkikisnya budaya Minahasa Selatan

4.1.10 Permasalahan di Bidang perencanaan wilayah dan Pembangunan

Permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah dan pembangunan termasuk koridor ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan, baik pada masing-masing tingkatan maupun lintas tingkatan pemerintahan.
2. Masih terbatasnya data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan yang baik.
3. Minimnya informasi mengenai dokumen perencanaan Tata Ruang.

4.1.11 Permasalahan yang Berkaitan dengan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut.

1. Kualitas SDM aparatur dalam pengendalian data base belum memadai
2. Sarana dan prasarana pengelolaan data belum memadai
3. Koordinasi data sektor masih lemah
4. Kesadaran masyarakat dalam mencatatkan kependudukan masih lemah

4.1.12 Permasalahan yang Berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan antara lain sebagai berikut.

1. Kurangnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun di swasta.
2. Masih sering terjadi perdagangan perempuan (*women-trafficking*).
3. Masih seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.



4. Belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

4.1.13 Permasalahan yang Berhubungan dengan Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan sosial di antaranya sebagai berikut.

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi belum memadai.
2. Peran serta masyarakat masih relatif rendah sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial.
3. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti perdagangan manusia (*trafficking*), HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba.
4. Terbatasnya fasilitas penampungan (*shelter*) untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

4.1.14 Permasalahan yang Berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut.

1. Masih kurangnya pembinaan kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kawasan perdesaan diantaranya air bersih, listrik, sanitasi, dan jalan ke sentra-sentra produksi pertanian pada beberapa daerah relatif sangat terbatas.
3. Masih kurangnya kompetensi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa.

4.1.15 Permasalahan yang Berkaitan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Permasalahan sering terjadi sehubungan dengan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sebagai berikut.

1. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih belum memadai.



2. Tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sangat menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Masih banyak jumlah koperasi yang tidak aktif.
4. Kepercayaan perbankan masih rendah terhadap UKM.
5. Kebanyakan usaha mikro dan kecil memiliki ketergantungan terhadap pendampingan fasilitator.

4.1.16 Permasalahan yang Berhubungan dengan Penanaman Modal Daerah

Permasalahan yang berhubungan dengan penanaman modal daerah antara lain sebagai berikut.

1. Masih rendahnya infrastruktur pendukung.
2. Promosi investasi belum dilakukan secara optimal.
3. Kurang tersedianya peta investasi/informasi.

4.1.17 Permasalahan yang Berkaitan dengan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Permasalahan yang berhubungan dengan pertanian, peternakan dan perkebunan di antaranya berikut ini.

1. Pengembangan agroindustri yang belum optimal dalam pengolahan dan pemasaran.
2. Pengembangan pertanian masih bersifat parsial pada sistem pertanian.
3. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global.
4. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai.
5. Tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, serta tata niaga bahan pangan pokok belum terkendali dengan baik.
6. Masih banyak alih fungsi atau konversi lahan yang tidak tertata.
7. Peremajaan tanaman perkebunan belum dilakukan secara optimal. Penyakit tanaman perkebunan belum tertanggulangi secara baik.
8. Animo petani untuk beternak masih kurang dan hama penyakit ternak relatif tinggi.
9. Masih terbatasnya industri yang mendukung pengelolaan produk turunan dari komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan.
10. Harga komoditas yang fluktuatif.



4.1.18 Permasalahan yang Berkaitan dengan Kehutanan

Permasalahan yang terkait dengan kehutanan antara lain sebagai berikut.

1. Masih kurangnya direhabilitasi luas lahan kritis.
2. Masih terjadinya alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan lain yang dilakukan secara ilegal.
3. Masih sering terjadi perambahan hutan secara ilegal (*Illegal logging*).

4.1.19 Permasalahan yang Berhubungan dengan Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut.

1. Masih kurangnya pengawasan/penertiban penambangan liar.
2. Sumberdaya mineral belum dilakukan pengelolaan secara optimal sehingga belum memberikan dampak berarti bagi perekonomian.
3. Pengelolaan sumberdaya mineral belum memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.

4.1.20 Permasalahan yang Berkaitan dengan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pariwisata antara lain sebagai berikut.

1. Umumnya obyek-obyek wisata kurang terawat dan tidak dikembangkan.
2. Sumberdaya manusia kepariwisataan kualitas relatif rendah.
3. Sinergitas antara pemerintah dengan swasta di bidang pariwisata belum dibentuk secara kokoh.
4. Promosi pariwisata belum dilakukan secara terpadu.
5. Paket-paket wisata alam, budaya, dan belanja belum dikemas dengan baik.
6. Kurangnya investor untuk pengembangan pariwisata

4.1.21 Permasalahan yang Berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di antaranya sebagai berikut.

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan belum dikelola secara maksimal.
2. Sarana dan prasarana belum memadai (*cold storage*, pengemasan dan pasar ikan higienis)



3. Masih sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).
4. Penggunaan teknologi perikanan tangkap dan budidaya (darat dan laut) yang lebih maju masih sangat terbatas.
5. Pemanfaatan daerah-daerah pesisir untuk kegiatan budidaya belum optimal.

4.1.22 Permasalahan yang Berkaitan dengan Perdagangan

Permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan antara lain sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya pembinaan kelompok-kelompok/usaha informal.
2. Promosi komoditas unggulan belum secara optimal.

4.1.23 Permasalahan yang berkaitan dengan Perindustrian

Permasalahan yang berhubungan dengan perindustrian antara lain sebagai berikut.

1. Masih terbatasnya pembinaan kelompok-kelompok pengrajin.
2. Masih kurangnya industri rumah tangga (home industry)
3. Agroindustri yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi komoditas-komoditas unggulan belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.
4. Teknologi pasca panen termasuk pengemasan belum tersedia secara memadai.
5. Masih terbatasnya produk turunan komoditas-komoditas unggulan terutama kelapa.

4.1.24 Permasalahan yang Berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain sebagai berikut.

1. Masih kurangnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.
2. Belum tertibnya sebagian organisasi kemasyarakatan yang ada.
3. Kesadaran dan wawasan politik masyarakat secara umum masih rendah.

4.1.25 Permasalahan yang Berkaitan dengan Pemerintahan Umum dan Kearsipan

Permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan umum dan kearsipan di antara lain sebagai berikut.



1. Tata pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah belum berjalan sesuai harapan.
2. Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya.
3. Clean and good government belum berjalan sebagaimana seharusnya.
4. Masih lemahnya pemahaman tentang aturan-aturan yang berlaku.
5. Kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih relatif rendah.
6. Kurangnya tersedia sarana mobil pemadam kebakaran.
7. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa belum memadai.
8. Masih kurangnya SDM pengelolaan kearsipan dan belum adanya penerapan pengelolaan arsip secara baku.
9. Pendataan adanya aset-aset belum dilakukan sesuai harapan.

4.1.26 Permasalahan yang Berkaitan dengan Kepegawaian

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kepegawaian adalah sebagai berikut.

1. Masih sering timbul masalah dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), seperti percaloan dan nepotisme.
2. Penempatan PNS belum sesuai dengan latar belakang pendidikan/kompetensi.
3. Belum meratanya distribusi PNS sesuai dengan kebutuhan tiap satuan kerja.

4.1.27 Permasalahan yang Berkaitan dengan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika antara lain sebagai berikut.

1. Telekomunikasi cakupan layanan untuk infrastruktur belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah perdesaan.
2. Belum tersosialisasinya program-program pemerintah secara baik.
3. Data base pemerintahan daerah relatif belum memadai.
4. Belum Optimalnya penataan dan pembinaan serta pengembangan pemanfaatan teknologi informatika bagi kemajuan masyarakat dan pemerintah daerah.



5. Belum adanya PERDA yang khusus mengatur tentang TIK (Teknologi Informasi Komunikasi).

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019 disebutkan bahwa dalam konstelasi pengembangan bermasyarakat dan bernegara, persoalan ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

4.2.2 PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi



masyarakat. Tantangan pembangunan SDM Minahasa Selatan di bidang pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak mendapatkan pendidikan dasar. Selain itu upaya pembangunan pendidikan yang harus memastikan agar seluruh penduduk usia sekolah memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Selain itu isu strategis dalam upaya membangun kesetaraan gender adalah masih kurangnya pemahaman terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang seharusnya dapat mengakselerasi percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan. Disadari juga perlunya upaya meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan



menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

4.2.3 PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG SEHAT, KUAT DAN TANGGUH

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan keper- sertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. Selain itu upaya memberantas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, bahaya penyebaran HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya. Selain itu tantangan untuk *mempertahankan capaian Millenium Development Goals* yang sudah tercapai pada tahun 2015 sambil mengejar target pembangunan *Sustainable Development Goals* yang harus dicapai pada tahun 2030. Lebih daripada itu, pemerintah dan masyarakat Minahasa Selatan akan mendorong percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* pada tahun 2030. Tantangan untuk mengambil manfaat dalam kerjasama *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* yang seharusnya dapat memperluas kesempatan masyarakat Minahasa Selatan meningkatkan daya saing untuk berkompetisi dengan sumberdaya manusia unggul di Negara ASEAN lainnya.

4.2.4. INFRASTRUKTUR

Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi relative masih belum optimal. Kondisi jalan Kabupaten Minahasa Selatan dalam kondisi mantap baru mencapai 60 % pada akhir



tahun 2015, sementara akses air bersih di seluruh wilayah Minahasa Selatan baru mencapai 56%. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Hal ini berarti infrastruktur yang menunjang aktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata menjadi sektor andalan. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.

Pembangunan infrastruktur seharusnya diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar kabupaten-kota dan antar kecamatan di wilayah Minahasa selatan untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4.2.5. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan akan diarahkan menjadi salahsatu penggerak ekonomi kemasyarakatan. Pada saat ini pengelolaan pariwisata belum maksimal sehingga manfaat pariwisata belum terlihat dalam pertumbuhan PDRB. Dalam lima tahun kedepan diharapkan masyarakat sekitar kawasan pariwisata di Minahasa selatan dapat menjadi aktor utama yang dapat menggerakkan minat masyarakat untuk mengangkat pariwisata di Minahasa Selatan menjadi industri pariwisata. Potensi sumberdaya alam dan keberadaan sumberdaya manusia yang mumpuni menjadi modal dasar pembangunan pariwisata selama lima tahun kedepan dan dipercaya dapat memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan pada umumnya.



4.2.6. PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai sumber daya lahan yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dan didayagunakan terutama untuk lahan pertanian. Berdasarkan data tahun 2015, potensi lahan sawah di Kabupaten Minahasa Selatan adalah seluas 5.391 Ha, sedangkan potensi lahan kering yang dimanfaatkan untuk padi ladang, palawija dan hortikutura adalah seluas 103.221 Ha.

Tabel 4.1

Luas Lahan Sawah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Lahan Sawah (Ha)				
		Irigasi Teknis	Setengah Teknis	Irigasi Desa	Tadah Hujan	Jumlah
1.	Tareran	-	-	199	78	277
2.	Suluun Tareran	-	-	30	-	30
3.	Tumpaam	-	230	77	3	310
4.	Tatapaan	-	330	-	70	467
5.	Amurang Timur	-	156	-	26	182
6.	Amurang	-	-	30	-	30
7.	Amurang Barat	-	-	25	-	25
8.	Tenga	-	616	29	2	647
9.	Sinonsayang	-	195	-	5	200
10.	Kumelembuai	-	-	20	-	20
11.	Motoling	-	-	97	-	97
12.	Motoling Timur	-	-	-	-	-
13.	Motoling Barat	-	-	97	-	97
14.	Ranoyapo	-	472	392	245	1190



15.	Tompaso Baru	-	719	121	-	840
16.	Maesaan	-	943	27	-	970
17.	Modoinding	-	-	-	-	-

4.2.7 PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan karena fungsinya sebagai tulang punggung kehidupan, penyedia pangan, energi, air dan penyangga sistem kehidupan. Seluruh potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan modal pembangunan untuk membangun sumberdaya manusia dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Adapun permasalahan pokok dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah produktivitas lahan pertanian dan luas lahan baku sawah yang semakin menurun, ditambah lagi dengan permasalahan pada sistem irigasi yang pada saat musim kemarau relative tidak dapat diharapkan dapat mengairi lahan persawahan.

4.2.8. TATA KELOLA: BIROKRASI EFEKTIF DAN EFISIEN

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *culture set*. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat



sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan belum efisien dan budaya pelayanan masih lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien dan pelayanan publik belum optimal.

4.2.9. CLEAN AND CLEAR GOVERNMENT

Prinsip dasar *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan-jabatan publik. Masalah ini diperburuk oleh belum terbangunnya sistem rekrutmen pejabat publik berdasarkan prinsip meritokrasi. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahap memang sudah ditingkatkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian harus diakui bahwa pencapaian Opini WDP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset barang milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif.

4.2.10 KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Salah satu faktor investor tertarik dalam berinvestasi yaitu faktor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selalu terpelihara yang dengan baik. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan sampai saat ini masih tetap terpelihara dengan baik, hal ini tidak terlepas dari setiap komponen masyarakat untuk selalu hidup Rukun dan Damai,



menghindar dari sesuatu pertikaian dan perselisihan, serta peran dari Aparat Keamanan dan Tokoh-Tokoh Agama. Hal ini menjadi modal Kabupaten Minahasa Selatan untuk menarik Investor.